

HIJRI

Jurnal Manajemen Kependidikan dan Keislaman

Vol.VI No.2 Januari-Juni 2012

Menimbang Visi Baru Pendidikan Islam

Peran Manajemen Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Madrasah

Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan (DIKLAT)

Mengidentifikasi Masalah-Masalah yang Berhubungan dengan Proses Pembelajaran

Pembaharuan Pendidikan Luar Sekolah

Konsep Manajemen Tradisional dan Modern; Sebagai Upaya Memikirkan Manajemen Pendidikan Islam

Persepsi Masyarakat Mandailing Natal Terhadap PERDA No. 6 Tahun 2003 Mengenai Busana Muslim

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik Interrelasi Filsafat dan Dakwah

Program Studi Kependidikan Islam
Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara
Medan

Penanggungjawab : Dr. Wahyudin Nur Nasution, MA
Ketua Penyunting : Drs. Mesiono, M.Pd
Wakil Ketua Penyunting : Candra Wijaya, M.Pd
Sekretaris Penyunting : Fridianto, M.Pd
Wakil Sekretaris Penyunting : Sholihatul Hamidah Daulay, M.Hum

Penyunting Pelaksana:

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd - Drs. H. Irwan Nasution, M.Sc
Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd - Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
Drs. Al-Rasyidin, M.Ag - Irwan S, S.Ag, MA - H. Abd. Aziz Rusman, Lc, M.Si

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. Z. S. Nainggolan, MA : (Universitas Negeri Jakarta)
Prof. Dr. Haidar Daulay, MA : (IAIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Pd : (Universitas Negeri Medan)
Prof. Dr. Baharuddin, M.A : (STAIN Padangsidimpuan)
Prof. Dr. Samsul Nizar, MA : (UIN Syarif Qasim Pekanbaru)
Prof. Dr. Firman, MS, Kons : (Universitas Negeri Padang)
Dr. Syaiful Sagala, M.Pd : (Universitas Negeri Padang)
Dr. Popy Fuadah : (Univ. Persada Indonesia Jakarta)
Dr. Murniati, M.Pd : (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)
Dr. Saidurrahman, M.Ag : (IAIN Sumatera Utara)

Bendahara

Nasrul Syakur Chaniago, M.Pd : Farida Repelitawati, M.Hum

Distribusi

Kaulan Karima, S.PdI

Tata Usaha

Muhammad Ihsan, S.PdI
Asrizal, S.Kom

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate-Medan 20731
Telp. 061-6622925-Fax. 061-6615683

DAFTAR ISI

Menimbang Visi Baru Pendidikan Islam Amiruddin. MS	1
Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Ahwan	16
Mengidentifikasi Masalah-Masalah yang Berhubungan dengan Proses Pembelajaran Haidir	29
Pembaharuan Pendidikan Luar Sekolah Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag	40
Konsep Manajemen Tradisional dan Modern; Sebagai Upaya Memikirkan Manajemen Pendidikan Islam (Pola Manajemen Islam diLihat Dari Pemikiran Sejarah) Solihah Titin Sumanti	54
Persepsi Masyarakat Mandailing Natal Terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2003 Mengenai Busana Muslim H.Bukhari Muslim Nst	73
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan Samin Sagala	87
Interrelasi Filsafat dan Dakwah Dra. Nashrillah, MG, MA	106
Peranan Manajemen Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd	121

Pembaharuan Pendidikan Luar Sekolah Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag

Abstract

Out of school education (PLS) is a conscious effort made to assist the development of personality and the ability of children and adults outside the school system. In implementation, PLS encountered barriers include: budget, facilities and infrastructure are minimal, development of the program has not been matched by the number and quality adequate power, there is no definite place of learning, a study plan that is not consistent. For that, there should be reforms to special education schools in the following manner: 1) implement a participatory approach, 2) reduce penstadaran programs that are sticky, 3) the program is directed not only on academic aspects but also aspects of the market, 4) emphasis on quality, 5) to plan the program starting from the bottom, 6) implement a program that consistently scheduled, 7) is more empowering potential and community participation at its own initiative based on the aspirations of the people, and 8) the addition of the education budget in proportion.

Kata Kunci: Pembaharuan, Pendidikan Luar Sekolah

Pendahuluan

Jalur pendidikan luar sekolah dan jalur pendidikan sekolah merupakan dua sisi yang paling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Namun demikian, pendidikan luar sekolah dalam penyelenggaraannya dihadapkan pada problema ganda. Di satu sisi beban tugas pendidikan luar sekolah semakin besar, apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997, namun di sisi lain layanan kelembagaan dan pendanaan yang diberikan sangat minim, sehingga tidak seimbang dengan beban tugas yang demikian besar.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah pada jalur pendidikan luar sekolah belum seperti yang diharapkan sebagai konsekuensi pengakuan menjadi salah satu jalur dalam sistem pendidikan nasional (Sudarsono, 1999). Pembangunan pendidikan nasional selama ini terlalu difokuskan pada jalur pendidikan sekolah semata. Sehingga hal ini sampai menimbulkan dogma bahwa "*pendidikan identik dengan sekolah, yang disebut*

belajar adalah bersekolah, dan bersekolah adalah diajar" (Sihombing, 2000: 9).

Kecenderungan itu, dapat dilihat pada waktu Indonesia mengalami masa keemasan, yakni yang lebih dikenal dengan istilah "*oil boom*". Pada saat itu dibangun beribu-ribu gedung sekolah, baik gedung SD, SLTP, maupun SLTA sedangkan untuk jalur pendidikan luar sekolah kurang mendapat perhatian.

Terbatasnya sarana-prasarana jalur pendidikan luar sekolah sudah barang tentu kurang dapat diandalkan baik secara kuantitas, apalagi secara kualitas. Sehingga eksistensi jalur pendidikan luar sekolah tidak banyak kontribusinya terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam kenyataan di lapangan ada pula yang beranggapan bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia ini hanya untuk kepentingan pemerintah dan bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi dan bukan untuk masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan terhadap pendidikan luar sekolah, agar pendidikan luar sekolah dapat mengimplementasikan program-programnya secara relevan dan efektif.

Untuk itu, tulisan ini akan membahas pembaharuan pendidikan luar sekolah yang meliputi: pengertian dan tujuan pendidikan luar sekolah, program pendidikan luar sekolah, hambatan pendidikan luar sekolah, dan pembaharuan pendidikan luar sekolah.

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah adalah semua usaha sadar yang dilakukan untuk membantu perkembangan kepribadian serta kemampuan anak dan orang dewasa di luar sistem persekolahan melalui pengaruh yang sengaja dilakukan melalui beberapa sistem dan metode penyampaian (Gunawan, 1995: 63).

Tujuan dari pendidikan luar sekolah adalah 1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya; 2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat/jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi jalur pendidikan sekolah (Suriyadi, 1999: 161). Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa pendidikan luar sekolah diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan mandiri.

Jalur pendidikan luar sekolah itu, sudah berkembang sejak Indonesia merdeka, namun dalam implementasinya pendidikan luar sekolah tampaknya kurang mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari pengaturan penyediaan anggaran dalam menunjang kegiatan pada jalur sekolah dan luar sekolah. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk menunjang program pendidikan sangat kecil.

Bahkan anggaran tersebut semakin lama semakin kecil persentasenya apabila dibandingkan anggaran dirjen pendidikan dasar dan menengah. Sebagai contoh, pada tahun 1999 hanya disediakan Rp 118 miliar atau 1,61 dari anggaran Depdiknas dan pada tahun 2000 jumlah anggaran malah menurun menjadi 57 miliar atau hanya 0,71 % dari anggaran Depdiknas (Sihombing, 2001: 184).

Pemerintah, tampaknya belum mau melihat pendidikan secara utuh atau lebih mementingkan pendidikan sekolah dan membiarkan pendidikan luar sekolah terlantar, "hidup segan mati tak mau" (Sihombing, 2000: 25). Semakin kecilnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk mengelola program pendidikan luar sekolah mengisyaratkan bahwa pemerintah menganggap pendidikan luar sekolah tidak penting dalam turut membawa bangsa ini menuju masyarakat yang berkemampuan, baik sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Di samping itu, banyak pula orang yang menganggap bahwa pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan kelas dua, karena yang dilayani pada umumnya orang yang kurang mampu secara ekonomis, di sisi lain masyarakat Indonesia masih lebih menghargai orang yang punyai ijazah formal karena keinginan untuk menjadi pegawai negeri ataupun pegawai kantor, bekerja untuk orang lain, atau menjadi buruh ditempat-tempat yang mengutamakan ijazah (Sihombing, 1999: II).

Pandangan-pandangan tersebut bertentangan atau kontroversi dengan pendapat Mochtar Buchori. Mochtar Buchori menyatakan bahwa pendidikan formal/sekolah sama pentingnya dengan pendidikan non formal/luar sekolah. Pendidikan luar sekolah besar pengaruhnya terhadap mutu angkatan kerja. Di

negara-negara yang angkatan kerjanya bermutu selalu tersedia lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah (Buchori, 1995: 4).

Di lembaga-lembaga itulah para pemuda yang karena berbagai alasan tidak lagi mengikuti pendidikan sekolah mendapat kesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan baru. Dengan berbekal keterampilan serta pengetahuan baru inilah, mereka dapat menemukan pekerjaan di berbagai lapangan kerja dalam sektor industri modern.

Kebijakan pemerintah yang menyepelekan keberadaan pendidikan luar sekolah sangat disayangkan. Karena pendidikan luar sekolah dapat memberikan sumbangan positif dan signifikan dalam pembangunan bangsa, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia belum terlayani oleh pendidikan persekolahan, di sisi lain hampir 70 % tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar.

Namun demikian, keadaan itu tidak membuat para pemikir pada jalur pendidikan luar sekolah menjadi kecil hati, mereka semakin gigih untuk mencari metode-metode baru yang lebih sesuai untuk membelajarkan warga masyarakat yang kurang beruntung, tidak memperoleh kesempatan mengikuti program persekolahan yang disebabkan karena ketidakmampuan keuangan dan lingkungan yang kurang mendukung. Hal ini sudah menjadi hukum alam di mana kesulitan dan ketidakadilan akan membangkitkan tumbuhnya kreativitas yang tinggi untuk menciptakan kekuatan dahsyat yang mampu mengantar keluar dari ketidakberdayaan.

Pendidikan luar sekolah menekankan dan menghargai kebiasaan sehingga lebih mengarah pada keterampilan yang akan mendorong orang untuk mulai mandiri sesuai potensinya dan tuntunan lingkungan di mana ia berada. Ijazah bukan menjadi tujuan, tetapi pengakuan masyarakat karena mampu membuka lapangan kerja untuk diri sendiri, itulah yang menjadi tujuan (Sihombing, 1999: III).

Karena itulah, pendidikan luar sekolah bertekad untuk menemukan cara-cara pembelajaran yang dapat membawa warga belajar menjadi cerdas, terampil dan mandiri dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti yang terjadi pada sistem pendidikan nasional lainnya.

Dalam masa kesulitan ekonomi di mana lapangan kerja semakin sukar, sementara pemutusan hubungan kerja semakin

menjadi kebiasaan. lapangan kerja masih terbuka luas di sektor informal yang tidak memerlukan ijazah tetapi memerlukan keterampilan, keluwesan, kemauan dan kesungguhan. Pendidikan yang menghasilkan tenaga untuk lapangan ini adalah pendidikan luar sekolah yang berbasis kemasyarakatan dan sekaligus hal ini menjadi peluang untuk perkembangan jalur pendidikan luar sekolah.

Program Pendidikan Luar Sekolah

Program pendidikan luar sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu program pokok dan program penunjang.

1. Program Pokok

Program pokok ini terdiri dari beberapa program. *Pertama*, pemberantasan buta aksara. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keaksaraan dasar warga masyarakat buta aksara sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kegiatan ini diselenggarakan untuk melayani warga masyarakat yang menyandang buta aksara, usia 10-44 tahun, dengan prioritas usia 17-30 tahun (Sihombing, 1999: 1). Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diselenggarakan selama enam bulan dalam kelompok-kelompok belajar, rata-rata tiap kelompok 10 orang, dibantu oleh seorang tutor. Materi pelajaran dan sarana belajar dikembangkan dan berkaitan dengan mata pencaharian warga belajar.

Kedua, Pengembangan Anak Usia Dini. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai departemen, organisasi kemasyarakatan yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembinaan anak. Program dilaksanakan dalam bentuk kelompok bermain, taman kanak-kanak, penitipan anak, bina keluarga anak di bawah lima tahun dan berbagai bentuk lainnya.

Ketiga, kejar paket A setara SD. Program ini dilaksanakan dengan prioritas kepada anak usia sekolah dasar yang tidak sekolah atau putus SD dalam usia wajib belajar (7-15). Kegiatan belajar dilaksanakan dalam kelompok belajar terdiri dari 20 orang dibantu oleh seorang tutor. Lama pendidikan minimal 3 tahun karena mulai belajar setara kelas empat SD.

Keempat, kejar Paket B setara SLTP. Program ini ditujukan kepada siswa lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP dan siswa putus SLTP dengan prioritas pada anak usia wajib belajar yang karena berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, jarak sekolah yang jauh sehingga tidak mampu mengikuti program persekolahan.

Kegiatan belajar diselenggarakan dalam kelompok belajar, terdiri dari rata-rata 40 orang dibantu oleh 6 orang tutor. Lama pendidikan minimal 3 tahun apabila mulai belajar dari setara kelas I SLTP.

Kelima, pembinaan kursus. Kursus merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah dan/ atau melanjutkan ketingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Kepres RI No. 68 Tahun 1998). Tujuan pembinaan lembaga ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan melalui penyelenggaraan kursus-kursus kejuruan dan/atau keterampilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.

Sampai saat ini, terdapat sekitar 22.000 kursus dari berbagai jenis keterampilan tersebar di seluruh Indonesia. Kursus ini diprakarsai dan dibiayai oleh masyarakat. Pemerintah hanya membina, yang dilaksanakan dalam bentuk perizinan, ujian nasional, peningkatan mutu kursus dan pengembangan model melalui standardisasi dan akreditasi.

Standardisasi dan akreditasi yang dilakukan pemerintah itu tidaklah dimaksudkan untuk mematikan lembaga kursus tapi bertujuan untuk memberikan pembinaan agar masing-masing kursus di seluruh tanah air menyelenggarakan program kursus yang berstandar baku (Suara Karya, 1999). Meskipun demikian sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan standarisasi dan akreditasi ini adalah ditemukannya lembaga kursus yang tidak masuk dalam kategori tertentu atau tidak terakreditasi.

Ada 9 jenis kursus yang sudah distandarisasikan dan sudah selesai diujicobakan yakni mekanik otomotif, elektronika, perhotelan, sekretaris, tata boga, tata busana, tata kecantikan, akutansi dan komputer. Pada tahun 1999 sudah dikembangkan lagi standarisasi untuk 5 jenis kursus lagi, yaitu perbankan, tour dan travel, akupunktur, bahasa Inggris dan Kompak (Komputer dan Akutansi).

Dalam penyelenggaraannya, kursus yang telah distandardisasikan dilaksanakan dengan sistem ganda artinya setelah belajar teori dan praktik di lembaga kursus selanjutnya warga belajar atau peserta kursus diwajibkan mengikuti praktek kerja lapangan di perusahaan atau industri.

Sistem itu tampaknya sama dengan *dual system* atau *sandwich* yang diterapkan di Jerman. Di dalam dual system ini, dua tempat belajar, sekolah dan perusahaan, saling melengkapi. Kaum muda mempelajari keterampilan-keterampilan dari pekerjaan tertentu di pabrik, bengkel kerja, laboratorium, kantor atau pertokoan dan bersamaan dengan itu mengikuti pendidikan kejuruan satu atau dua hari dalam seminggu (Delors, 1999: 77). Untuk menjamin agar pengajaran teori dan praktik yang diberikan di dua tempat itu saling melengkapi, maka kedua jenis pendidikan itu dikoordinasi. Penerapan dual system di Jerman ini ternyata telah membangkitkan banyak peminat di seluruh dunia pada tahun-tahun belakangan ini.

Di Indonesia, dalam penyelenggaraan sistem ganda itu, telah terjalin kemitraan dengan kamar dagang industri (KADIN), organisasi profesi dan perusahaan terkait sehingga setelah warga belajar selesai mengikuti pendidikan, maka ia telah memiliki kompetensi sesuai yang disyaratkan oleh dunia usaha/industri.

2. Program Penunjang

Program penunjang merupakan program yang dikembangkan melalui kegiatan rintisan-rintisan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat yaitu meliputi program pemberdayaan ekonomi pedesaan, program kursus masuk desa, penyediaan dan pengembangan sarana belajar pokok dan pelengkap antara lain melalui penyediaan fasilitas kerja, latihan ketenagaan, bantuan teknis, serta monitoring dan evaluasi melalui pengembangan Sistem Manajemen Informasi (SIM) pendidikan masyarakat dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar tingkat nasional.

Hambatan Pendidikan Luar Sekolah

Dalam mencapai tujuannya, pelaksanaan pendidikan luar sekolah menemui hambatan-hambatan. *Pertama*, sistem perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah. Masih kuatnya sistem perencanaan dari atas (*top down*), penyeragaman program, penyeragaman sistem dan mekanisme pelaksanaan program, kurang memberi ruang dan peluang bagi perencanaan dari bawah (Sihombing, 2001: 195).

Akibatnya masyarakat menjadi sangat tergantung pada pemerintah dan kemandirian masyarakat tidak berhasil ditumbuhkan. *Kedua*, kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap

kemampuan dan kekuatan energi masyarakat untuk mengambil peran dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemaksaan kehendak dan pengorbanan hasil program. *Ketiga*, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana. Keterbatasan dukungan anggaran, sarana dan prasarana belajar dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan luar sekolah semakin berkurang (Sihombing, 2001: 195-196).

Keempat, perkembangan program belum diimbangi jumlah dan mutu tenaga yang memadai. Misalnya untuk penilik pendidikan luar sekolah, masih ada beberapa penilik pendidikan luar sekolah yang menangani lebih dari satu kecamatan, dan dari kecamatan yang ada belum seluruhnya memiliki penilik pendidikan luar sekolah.

Demikian pula kebutuhan akan tutor, sebagai contoh untuk paket B setara SLTP, seharusnya membutuhkan rata-rata 8 tutor, kenyataan dilapangan baru 5 tutor untuk setiap kelompok belajar. Apabila secara akademik, warga belajar paket B diharapkan benar-benar setara SLTP, maka seharusnya setiap kelompok dibantu oleh 10 orang tutor.

Kelima, Ratio modul untuk warga belajar paket A dan B masih jauh dari mencukupi. Seharusnya mereka rata-rata tiap orang memperoleh 51 modul tiap tingkatan untuk paket A dan 54 modul untuk paket B, namun yang ada dilapangan barulah rata-rata 17 modul per-orang pada setiap tingkatan atau dengan kata lain ratio modul baru mencapai 1:3 (1 set modul untuk 3 orang warga belajar).

Hal itu terjadi karena pengadaan modul murni dari pemerintah, PLS belum berhasil menggugah dan memobilisasi sumbu-sumber dana yang dapat mendukung program belajar yang ada di masyarakat. Demikian pula pengadaan sarana belajar pelengkap seperti kaset bahasa Inggris, peralatan praktikum untuk IPA sama sekali belum dapat diandalkan, padahal sangat diperlukan untuk menunjang kualitas hasil pembelajaran.

Keenam, tidak ada tempat belajar yang pasti, sehingga sukar untuk memantau kebenaran pelaksanaan program pembelajaran. Di sisi lain kualitas hasil pembelajaran sulit dilihat kebenarannya dan sukar diukur tingkat keberhasilannya (Sihombing, 2000: 43). Hal

ini terjadi karena pemerintah di dalam melaksanakan pendidikan luar sekolah terlalu yakin bahwa pembelajaran bisa di mana saja dan akan terjadi seperti apa yang ditulis di atas kertas. Secara teoritis memang benar, tapi sulit dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Ketujuh, lemahnya akurasi data/informasi tentang sasaran program karena terbatasnya tenaga di lapangan baik kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukungnya yang belum memadai. Di sisi lain aspek yang banyak menghambat adalah jadwal pelaksanaan belajar mengajar yang sering tidak tepat waktu.

Kedelapan, adanya paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada pendidikan sekolah semata. Padahal anantara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah saling berkesinambungan dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Melalui tempat kursus, pesantren, dan PLS lainnya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan dapat diserap.

Banyak masyarakat yang memaksakan anaknya untuk menempuh pendidikan hanya melalui sekolah formal dengan tujuan untuk mendapatkan ijazah dan dapat diterima bekerja di suatu perusahaan. Namun realitasnya, banyak anak yang gagal/berhasil lulus sekolah, tapi tidak diterima bekerja di suatu perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan minimnya kemampuan sumber daya manusia karena kualitas dan kemampuannya juga rendah. Semua teori memang didapat di bangku sekolah, tapi prakteknya justru akan didapatkan melalui pendidikan luar sekolah.

Pembaharuan Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan Indonesia secara serentak menghadapi masalah yang kompleks. Di satu pihak, kenyataan masih adanya warga masyarakat yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan/atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar di samping masih ada lapisan masyarakat yang karena faktor ekonomi, demografi dan budaya tidak mampu mengirimkan anak-anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah.

Di lain pihak di era globalisasi dan penuh perubahan ini, semua masyarakat dituntut untuk belajar terus agar dapat menyesuaikan kemampuan dan sikapnya dengan perkembangan masyarakat dan zamannya. Untuk itu perlu dijamin terselenggaranya dan tersedianya pelayanan pendidikan luar

sekolah (Soedijarto, 2000: 95). Secara khusus jaminan ini tercantum dalam pasal 31 ayat 1: "tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan luar sekolah secara relevan dan efektif, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap pendidikan luar sekolah. Usaha-usaha pembaharuan yang perlu dilakukan terhadap pendidikan luar sekolah adalah sebagai berikut.

Pertama, melaksanakan pendekatan partisipatif. Partisipatif mengandung arti ingin ikut dalam proses, semua orang yang terlibat mempunyai kesempatan yang sama baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, sehingga masyarakat akan merasa sebagai pembuat keputusan dan pemilik program.

Kedua, menerapkan empat pilar pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu:

1. *Learning to know*. Pilar ini pada kakikatnya sejalan dengan penerapan paradigma ilmu pengetahuan. Melalui penerapan paradigma ini warga belajar akan memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya, sehingga proses pembelajaran yang akan ditempuh akan lebih bermakna untuk dialihkan dalam mempelajari hal-hal lainnya (*transfer of learning*) (Soedijarto, 1999: 127).
2. *Learning to do*. Pilar ini merupakan upaya agar warga belajar menghayati proses belajar dengan melakukan suatu yang bermakna, suatu proses pembelajaran yang dikenal *active learning* (Soedjatmiko, 2001: 56-57). Melalui pendekatan belajar ini seorang anak misalnya tidak harus selalu mencatat ceramah guru, melainkan warga belajar diminta untuk membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas untuk selanjutnya membahasnya di kelas bersama guru dan teman-temannya.
3. *Learning to be*. Pilar ini merupakan suatu prinsip pendidikan yang dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya warga belajar yang mandiri. Rasa mandiri akan tumbuh dari sikap percaya diri. Sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan dirinya secara tepat (Soedijarto, 1999: 128). Atas dasar itu proses pembelajaran pertama-tama harus memungkinkan warga belajar mengenal

dirinya dengan penuh kebahagiaan. Kebahagiaan akan diperoleh melalui belajar aktif dan belajar tuntas.

4. *Learning to live together*. Pilar ini di dunia internasional bertambah penting karena dalam era globalisasi yang sarat muatan teknologi dan perdagangan bebas (Sindhunata, 2001: 57), dimensi kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh setiap agama sering terlupakan karena tekanannya kepada pertambahan nilai secara kebendaan. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang memungkinkan warga belajar menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus menerus adalah sangat penting. Untuk itu, pendidikan nilai kemanusiaan, moral dan agama yang melandasi hubungan antar manusia perlu diintensifkan. Bagi kita di Indonesia pendidikan pancasila, pendidikan agama, ilmu pengetahuan sosial dan sejarah secara potensial dapat dijadikan wahana pendidikan nilai.

Ketiga, menjalin kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan industri atau perusahaan. Kemitraan itu harus menggambarkan kesejajaran yang saling membantu dan disemangati kesediaan dan kesiapan untuk melayani masyarakat. Melalui kemitraan ini dapat menumbuhkan kreasi baru yang kemudian akan membuka peluang-peluang baru bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa: "*Innovation creates opportunity, quality creates demand, teamwork creates it to happened* (Sihombing, 2001: 193).

Keempat, mengurangi penstandaran program yang bersifat kaku. Pada program yang tidak standar bukan berarti tidak ada pegangan yang pasti. Yang tidak standar adalah program, pendekatan, materi, tempat, sarana, namun dalam hal kualitas harus ada standar minimum yang harus dicapai oleh setiap program. Di sini diberikan kebebasan untuk mengembangkan program sesuai dengan lingkungan di mana program akan dilaksanakan.

Kelima, orientasi program bergerak dari orientasi akademis teoritis mengarah kepada orientasi pasar. Untuk ini memerlukan kemampuan mengadakan pemantauan, penilaian, analisis, tentang keadaan pasar lokal, sehingga program yang akan dikembangkan akan menjamin hasil yang laku jual.

Keenam, mementingkan kualitas serta bermakna dan fungsional bagi kehidupan warga belajar tanpa melupakan aspek kuantitas. Setiap program yang dilaksanakan dijamin hasilnya

bermanfaat untuk menunjang kehidupan warga belajar. Jadi bukan banyaknya program yang menjadi acuan tetapi manfaat program untuk kehidupan warga belajar. *Ketujuh*, merencanakan program yang dimulai dari bawah bukan dari atas. Segala keputusan ada pada warga sedangkan petugas pemerintah cukup berperan membantu merumuskan perencanaan program dan kemudian membicarakannya kepada warga.

Kedelapan, melaksanakan program berdasarkan jadwal dan berada ditengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat setiap saat dapat melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program Sihombing, 2000: 95). Untuk menjamin keberhasilan program perlu ada jadwal yang pasti yang dibuat bersama warga belajar, agar jadwal tersebut dapat dipatuhi pelaksanaannya. Di samping itu, pendidikan luar sekolah perlu lebih memberdayakan potensi dan peran serta masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dari uraian tentang usaha-usaha pembaharuan terhadap pendidikan luar sekolah tersebut, jelas kelihatan bahwa setiap perubahan akan menuntut perubahan yang lain yang dilaksanakan secara simultan, sehingga perubahan itu menjadi seperti suatu sistem yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pendidikan luar sekolah adalah semua usaha sadar yang dilakukan untuk membantu perkembangan keperibadian serta kemampuan anak dan orang dewasa di luar sistem persekolahan melalui pengaruh yang sengaja dilakukan melalui beberapa sistem dan metode penyampaian. Pendidikan luar sekolah ini memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya; 2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat/jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi jalur pendidikan sekolah.

Secara umum pendidikan luar sekolah memiliki dua program, yaitu program pokok dan program penunjang. Dalam

implementasinya, ada beberapa hambatan yang dihadapi pendidikan luar sekolah, yaitu: sistem perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kemampuan dan kekuatan energi masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan, anggaran, sarana dan prasarana yang sangat minim, perkembangan program belum diimbangi dengan jumlah dan mutu tenaga yang memadai, ratio modul untuk warga belajar masih jauh dari mencukupi, tidak ada tempat belajar yang pasti dan lemahnya akurasi data/informasi tentang sasaran program dan jadwal belajar yang tidak konsisten, dan adanya paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada pendidikan sekolah semata. Padahal antara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah saling berkesinambungan dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan terampil.

Pembaharuan yang perlu dilakukan terhadap pendidikan luar sekolah adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan pendekatan partisipatif, 2) mengurangi penstadaran program yang bersifat kaku, 3) program diarahkan tidak hanya pada aspek akademis tapi juga aspek pasar, 4) mementingkan kualitas, 5) merencanakan program mulai dari bawah, 6) melaksanakan program yang terjadwal secara konsisten, 7) lebih memberdayakan potensi dan peran serta masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan 8) penambahan anggaran pendidikan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Muchtar, *Transformasi Pendidikan*, Jakarta: IKIP MJ Press, 1995.
- Delors, Jackues, *Learning : The Treasure Within*, terjemah oleh P. Napitupulu, W. *Belajar:Harta Karun Didalamnya*, Jakarta: The Indonesian Comission for UNESCO, 1999.
- Gunawan, Ary H., *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Kepres RI No. 68 Tahun 1998
- Sindhunata, Ed., *Mengggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisisus, 2000.
- Soedijarto, *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa*, Jakarta: CINAPS, 2000.
- Sudarsono, Juwono, "Pendidikan Luar Sekolah" dalam *Republika*, 23 September 1999.
- Umberto Sihombing, *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*, Jakarta: PD. Mahkota, 1999.
- _____, *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi*, Jakarta: PD. Mahkota, 2000.

HIJRI

Jurnal
Manajemen Kependidikan
dan Keislaman

Program Studi Kependidikan Islam
Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar, Psr V Medan Estate,
Telp.061-6622925 Fax.061-6615683
Medan 20371

ISSN 1979- 8075



9 771979 807556